

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada saat kedatangan awal Belanda ke Jambi, daerah Jambi sudah memiliki sistem pemerintahan yaitu kerajaan yang dipimpin oleh seorang Sulthan, Sulthan adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh pangeran ratu (putra mahkota, yang mana nantinya akan melanjutkan titah kesultanan), dibawahnya terdapat Rantau yang dipimpin oleh seorang Jenang, sedangkan nagari yang dipimpin oleh seorang Batin begitupun selanjutnya seperti Luhak Berpenghulu, Kampung Bertuo Dan Rumah Bertenggana.<sup>1</sup>

Masuknya Jepang ke Jambi telah membawa perubahan besar. Setelah seluruh daerah Jambi dapat dikuasi oleh pasukan tentara Jepang dengan singkat, maka pada tanggal 10 Maret 1942 disusunlah pemerintahan oleh tentara Jepang yang pada saat itu susunan ketatanegaraan dari Belanda masih dipertahankan, perubahan tersebut hanya sedikit yaitu perubahan nama dan istilah yang diganti dengan istilah Jepang, serta semua istilah dalam pemerintahan diganti kedalam bahasa Jepang, seperti keresidenan diganti dengan Syucokan, Afdeeling disebut dengan Bunsyu digantikan dengan gun dan dikepalai oleh Bunsyu-co, maka pada masa pemerintahan Jepang di daerah Jambi. Syucokan membawahi enam Bunsyu-co

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat penuh atas wilayahnya sendiri, maka presiden Soekarno Hatta membuat sebuah badan yang bernama KNIP (Komiter Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. Selanjutnya KNIP tersebut mengangkat orang disetiap daerah

---

<sup>1</sup> Proyek Investarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Imperialisme Didaerah Jambi, (Jakarta: depdikkeb, 1983), hal. 35

(KNID) tugasnya adalah membantu Gubernur yang diangkat langsung oleh presiden. Pada awal-awal kemerdekaan Indonesia masih terdapat 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Gubernur Sumatera yang pertama adalah Mr, Tengku Muhammad Hasan , yang merupakan tahap awal bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara berdaulat penuh, dengan pernyataan kemerdekaan, yang pada hakikatnya secara de jure Indonesia merdeka, akan tetapi secara de facto yang menunjukkan bahwa kekuatan bangsa asing masih bertahan dan belum meninggalkan Indonesia pada saat itu, hal ini telah terbukti dengan adanya kedatangan sekelompok tentara Sekutu pada akhir bulan September tahun 1945.<sup>2</sup>

Keresidenan Jambi tergabung dalam provinsi sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Selang beberapa tahun kemudian Provinsi Sumatera di pecah menjadi tiga provinsi, yaitu provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Tengah. Sumatera Barat, Riau, dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan dalam provinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, provinsi Sumatera Tengah di pecah.<sup>3</sup>

Keresidenan Jambi sendiri memiliki dua Pemerintahan Kabupaten yakni Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin. Setip Kabupaten membawahi pemerintahan Kewedanaan. Adapun Kabupaten Batang Hari membawahi tiga Kewedanaan yakni: 1. Kewedanaan Jambi Luar Kota (Wilayah Muaro Jambi hari ini) 2. Muara Tembesi (Kabupaten Batang Hari pada hari ini) 3. Kuala Tungkal (Wilayah Tanjung Jabung Barat dan Timur hari ini).<sup>4</sup> Pada tanggal 18

---

<sup>2</sup> Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia. Jilid VI, ( Jakarta: Balai Pustaka 1997 ), hal. 37

<sup>3</sup> Lindayanti.

<sup>4</sup> Supian Dan Lagut. 2020. Pertempuran Kasiro-Sungai Pinang Batang Asai Menghadapi Agresi Militer Belanda II di Kewedanaan Sarolangun 1948-1949. KERATON : Journal of History Education and Culture Vol. 2, No. 2, Desember 2020

April 1946. Keresidenan Jambi yang dibentuk 2 Kabupaten dan 1 kota Praja yakni Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, dan Kota Praja Jambi. Kabupaten Merangin atau disebut sebagai Kabupaten Jambi Hulu membawahi beberapa Kewedanaan seperti Kewedanaan Sarolangun, Kewedanaan Bangko, Kewedanaan Bungo dan Kewedanaan Tebo. Kemudian Kabupaten Batanghari disebut dengan istilah Kabupaten Jambi Hilir dengan membawahi Kewedanaan Muaro Tembesi, Kewedanaan Jambi Luar Kota, Kewedanaan Kuala Tungkal dan Kewedanaan Muara Sabak<sup>5</sup>

Pemerintahan Kewedanaan adalah pemerintahan yang diperkenalkan pasca Indonesia merdeka pada sidang BPUPKI 19 Agustus 1945 dibawah daerah Kabupaten. Kemudian Kewedanaan membawahi beberapa Kecamatan dan Marga. Menurut Supian Ramli dan Lagut dalam Jurnal Moderasi Intitut Agama Islam Negeri Palu. Kewedanaan pada masa Hindia Belanda disebut *ondeer afdeeling* kemudian oleh Jepang dirumah menjadi *Gun*. Dengan pemerintahan Republik Indonesia berubah dengan istilah Kewedanaan atau pembantu bupati. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kewedanaan adalah pemerintahan daerah pembantu kabupaten.<sup>6</sup>

Kewedanaan Jambi Luar Kota merupakan salah satu Kewedanaan di Kabupaten Batang Hari yang beribukota di Kenali Asam. Kewedanaan Jambi Luar Kota berpusat di Pijoan. Wilayah Kewedanaan Jambi Luar Kota meliputi wilayah Kabupaten Muaro Jambi pada hari ini. Selain sebagai pemerintahan Kewedanaan. Jambi Luar Kota aktif sebagai pemerintahan yang berjuang masa agresi 1948. Kewedanaan Jambi luar Kota di hapus pada tahun 1963 sehingga

---

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Supian dan Lagut. 2020. Perubahan Birokrasi Pemerintahan Kewedanaan Rawas 1943-1963.

nama dari Ex Kewedanaan Jambi Luar Kota menjadi administrasi wilayah setingkat Kecamatan yakni Kecamatan Jambi Luar Kota.<sup>7</sup>

Penelitian sejarah wilayah Ex Jambi Luar Kota bagaikan hutan yang belum dijamah oleh tangan manusia. Sangat jarang penulisan sejarah di wilayah spasial ini menggugah penulis untuk kembali mencoba dan mengkonstruksikan sejarah Kewedanaan Jambi Luar Kota. Kemudian tulisan ini memiliki keunikan seperti yang kita ketahui proses kemerdekaan di Indonesia merubah kembali tatananan pemerintah di wilayah Indonesia khususnya Jambi. Jambi Luar Kota sebagai wilayah Kewedanaan dibawah pemerintahan Kabupaten Batang Hari. Mengalami dinamika dalam struktur pemerintahan yang mana status kewedanaan dihapus pemerintahan Jambi Luar Kota harus kembali menjadi wilayah Kecamatan.

Melihat gambaran diatas penelitian ini sangat unik untuk ditindak lanjuti. Mengingat sangat jarang sekali para penulis meneliti sejarah Muaro Jambi. Mengingat Jambi Luar Kota merupakan tempat berdirinya Universitas Jambi sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini. Disamping alasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan Kewedanaan Jambi Luar Kota Jarang dibahas dalam historiografi yang ada. Padahal Kewedanaan Jambi Luar kota merupakan pemerintahan yang pernah exist dan cikal bakal Kabupaten Muaro Jambi pada hari ini. Dengan demikian penulis memberikan Judul “**Perkembangan Pemerintahan Jambi Luar Kota 1945-1963**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Potret Daerah Kewedanaan Jambi Luar Kota?

---

<sup>7</sup> Arsip. Laporan Kementrian Penerangan. Provinsi Sumatera Tengah. 22 Juli 1950

2. Bagaimana Perkembangan Kewedanaan Jambi Luar Kota Masa Kemerdekaan?

3. Bagaimana Masa Akhir Kewedanaan Jambi Luar Kota?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Pembatasan ruang dan lingkup atau spasial dan temporal dalam penelitian sejarah sangatlah penting, tujuannya agar penelitian bisa terarah dan tidak terlalu meluas sehingga bisa memfokuskan pada satu permasalahan dengan dilatar belakangi tempat serta waktu yang jelas, seperti pada judul yang diangkat dalam penelitian ini yakni “Perkembangan Pemerintahan Kewedanaan Jambi Luar Kota Tahun 1945-1963”. Secara pemilihan tempat atau spesial penelitian ini memilih daerah Jambi Luar Kota (Muara Jambi pada hari ini) sebagai daerah yang akan diteliti.

Kemudian secara batas waktu atau temporalnya penulis mengambil tahun 1945-1963 sebagai batasan waktu yang akan diteliti. Adapun alasan memilih kurun waktu tersebut ialah karena pada tahun 1945 merupakan tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang memberi dampak yang cukup signifikan dalam Birokrasi Pemerintahan Republik Indonesia serta terbentuknya wilayah-wilayah Kewedanaan termasuklah Kewedanaan Jambi Luar Kota. Kemudian batas akhir pada tahun 1963 alasan mengambil tahun tersebut karena pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia terjadilah penghapusan Kewedanaann dan Keresidenan dengan ini secara otomatis Kewedanaan Jambi Luar Kota statusnya menjadi Kecamatan dibawah Kabupaten Batang Hari yang beribukota di Kenali Asam.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Untuk mengetahui apa itu potret Kewedanaan Jambi Luar Kota

1.4.2 Untuk mengetahui Perkembangan Pemerintahan Kewedanaan Jambi Luar Kota

1.4.3 Untuk mengetahui proses Akhir Kewedanaan Jambi Luar Kota.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi akademis maupun Teoritis yakni sebagai berikut:

1. Akademis

- a. Memperdalam serta menerapkan wawasan yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan sehingga dapat menambah tulisan mengenai sejarah lokal khususnya Kecamatan Jambi Luar Kota
- b. Diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi akademisi dan pemerhati sejarah dalam penulisan sejarah di Kabupaten Muaro Jambi

2. Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberi gambaran dari Kewedanaan Jambi Luar Kota masa awal kemerdekaan hingga berakhir tahun 1963
- b. Dapat memberi keterangan dari perkembangan Kewedanaan Jambi Luar Kota secara Kronologis.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah uraian secara sistematis dari hasil penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. <sup>8</sup>Tulisan penelitian mengenai Sejarah Lokal di Muara Jambi minim sekali, namun ada beberapa karya tulis yang relevan dan dapat mendukung penelitian ini, diantaranya terdapat buku

---

<sup>8</sup> Kuntowijoyo, “*Pengantar Ilmu Sejarah*”, (Yogyakarta:Betung Budaya, 1995). Hlm. 10

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahma Winata yang berjudul, “perjuangan rakyat Batanghari menghadapi agresi militer Belanda II 1948-1949”, yang membahas perjuangan rakyat Batanghari dalam agresi militer Belanda II yang hanya membahas sedikit tentang agresi militer Belanda di Jambi.<sup>10</sup> Pada penelitian diatas yang menjadi persamaan dengan penelitian ini ialah agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Jambi serta peran masyarakat dalam melawan agresi militer tersebut, kemudian yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah tempat penelitian yang menjadi acuan penelitian ialah Jambi Luar Kota sedangkan yang penelitian diatas membahas peran rakyat batanghari. Kemudian Batang Hari sendiri merupakan Kabupaten yang membawahi Kewedanaan Jambi Luar Kota.

Kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Supian Ramli dan Lagut Bakaruddin yang berjudul “ *Perubahan Birokrasi Pemerintahan Daerah Kewedanaan Rawas 1943-1950*” di dalam jurnal tersebut dibahas mengenai perubahan dari sistem Pemerintahan Kewedanaan Rawas dari masa Belanda, Jepang hingga Republik Indonesia. Jurnal ini membantu penulis dalam mengetahui perubahan sistem Pemerintahan di daerah Sumatera Tengah yang mana pada saat itu antara Jambi dan Palembang sistem Pemerintahannya tidak jauh berbeda bahkan cenderung sama.

Ketiga, buku ini ditulis oleh Drs Bambang Suwondo yang diterbitkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan Daerah 1979 yang berjudul “Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jambi”. Buku ini membahas sejarah sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan secara struktural yang merupakan daerah keresidenan dari Provinsi Sumatra Tengah. Yang menjadi persamaan ialah membahas Jambi pada kurun tahun 1945-1949, sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah penelitian ini lebih memfokuskan pada peran masyarakat Jambi Luar Kota dalam melawan agresi militer di Jambi, Khususnya Kota Jambi. Sedangkan skripsi ini lebih memfokuskan pada Pemerintahannya.

Kemudia jurnal yang ditulis oleh Hermanto Harun dan Irma Sagala yang berjudul “ *Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi : Studi Kasus Kabupaten Bungo*” Dalam jurnal ini membahas mengenai Muara Bungo masa Kesultanan, Belanda, Jepang, dan Kemerdekaan. Jurnal ini lebih berfokus pada sistem Pemerintahan Tradisional yang ada di Muara Bungo termasuklah pada masa Kewedanaan. Jurnal ini membantu penulis dalam menuliskan tentang Pemerintahan Kewedanaan.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Aulia Shuraya dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi yang berjudul “ *Perjuangan Rakyat Bungo Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*” Skripsi ini membahas mengenai perjuangan Rakyat Bungo pada masa Kewedanaan di dalam skripsi ini juga dibahas mengenai tokoh pejuang Muara Bungo yakni H.Hanafy dan M. Nasir. Skripsi ini membantu penulis dalam menguraikan tentang peperangan yang terjadi masa Kewedanaan Muara Bungo.

Kesamaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tema pokok yaitu mengenai Kewedanaan Jambi Luar Kota masa Kemerdekaan yang saat itu dijadikan sebagai pemerintahan dibawah Kabupaten, kemudian pembahasan mengenai Sistem Pemerintahan serta terbentuknya sebuah Kabupaten. Akan tetapi terdapat Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian diatas adalah dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada masa Kewedanaan Jambi Luar Kota hingga terdapatnya penghapusan Kewedanaan yang akhirnya menjadi daerah setingkat Kecamatan.

## **1.6 Landasan Teori**

Terjadinya dinamika perubahan dalam birokrasi Pemerintahan tentu memberi dampak perubahan bagi masyarakat baik itu dari segi Sosial, Ekonomi dan Politik sehingga dalam



penelitian ini penulis menggunakan teori Perubahan Sosial sebagai landasan teorinya. Perubahan Sosial merupakan fenomena kehidupan sosial yang tidak bisa dihindari oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. Terjadinya perubahan sosial merupakan gejala wajar yang muncul sebagai suatu proses perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Proses tersebut berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia, baik itu dalam lingkup lokal maupun global. Perubahan sosial tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya masyarakat itu tidak bersifat statis melainkan dinamis dan heterogen.<sup>9</sup> Perubahan sosial juga dapat terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, kebudayaan, dan perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis.<sup>10</sup>

Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial adalah yang meliputi segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>11</sup> Teori perubahan sosial yang cocok sebagai pisau analisis penelitian ini dikarenakan untuk meneliti sebuah perkembangan politik lokal perlu melihat dinamika perubahannya. Dimulai dari awal terbentuknya Kewedanaan Jambi Luar Kota sampai dengan dikatakan bahwa Jambi Luar Kota sebuah kewedanaan yang wilayahnya Kabupaten Muaro Jambi pada hari ini

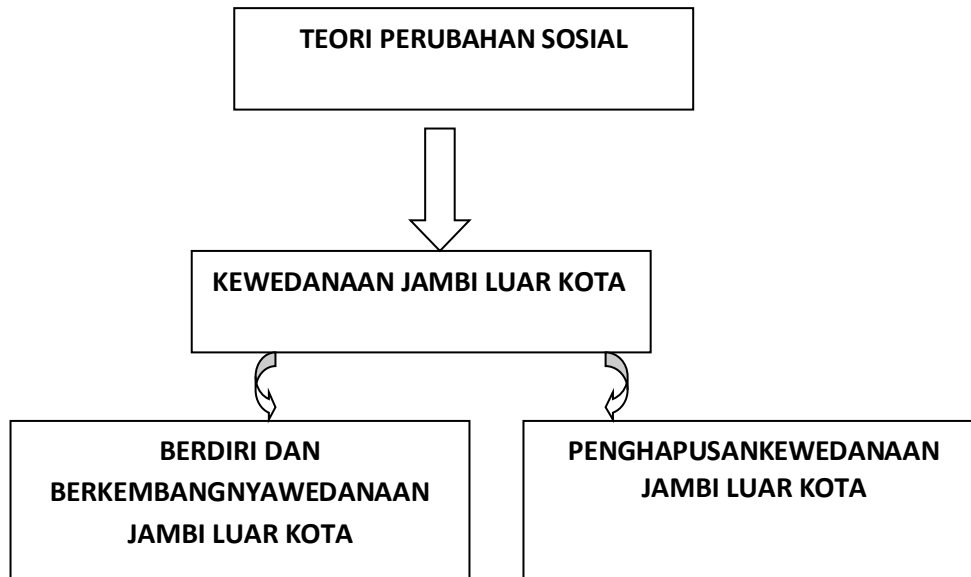
---

<sup>9</sup> Syaifudin Jurdi, *Awal Mula Sosiologi Modern: Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), hlm. 78.

<sup>10</sup> Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2020) hlm.20

<sup>11</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 4.

Dengan demikian yang terjadi dalam Kewedanaan Jambi Luar Kota sejak tahun 1963 Kewedanaan Jambi Luar Kota berubah sttaus menjadi Kecamatan. Sehingga ditariklah kerangka berpikir sebagai berikut:



## 1.7 Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara, jalan, untuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Sedangkan penelitian berarti penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu objek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau untuk menyokong dan menolak suatu teori. Metode penelitian yang dimaksud adalah mengumpulkan, menguji, dan menganalisis sumber-sumber yang tersedia.<sup>12</sup>

Dalam melakukan pengumpulan sumber ini menggunakan metode sejarah yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu dan pada prinsipnya penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus bersusun berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat keinginan atau permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaan landasan teoritis dalam kepustakaan untuk

---

<sup>12</sup> Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta:Ombak, 20070, hlm.89).

mendapat jawaban sementara (hipotesisi), kemudian dirancang dan dilakukan pengumpulan data (fakta) untuk menguji hipotesis melalui analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya<sup>13</sup>

Penulisan sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang bersifat sistematis dan objektif maka perlu diperhatikan empat langkah utama dalam kegiatannya. Keempat langkah tersebut ialah pertama usaha mencari, mengumpulkan jejak atau sejarah masa lampau, kedua usaha untuk meneliti jejak sejarah masa lampau secara kritis, ketiga menginterpretasikan hubungan fakta satu dengan yang lain yang mewujudkan peristiwa tertentu, langkah keempat menyampaikan hasil rekonstruksi masa lalu melalui penulisan sejarah.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan tahapan - tahapan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>14</sup>

#### 1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani (*heurisein*) yang mempunyai arti menemukan, maka dari itu heuristik tidak memiliki peraturan-peraturan umum, jadi heuristik secara sederhana merupakan tahap proses menemukan, menangani dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang diperlukan dalam kegiatan penelitian, menurut Lucey, heuristik ialah kesaksian dalam informasi yang perlu dilakukan untuk kegiatan penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Kuntowijoyo, *Pegantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Betung Budaya, 1995)

<sup>14</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007. Hlm 68

<sup>15</sup> Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombat, 2015), Hal. 28

Heuristik adalah usaha menemukan sumber-sumber sejarah yang nantinya dapat dipercaya dan mampu menjelaskan persoalan-persoalan penting yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian sejarah.<sup>16</sup>

pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber sumber yang relevan dengan kajian penelitian ini. Pertama, penulis melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Kedua, penulis juga mencari sumber-sumber tertulis yang terdapat di perpustakaan baik itu di perpustakaan Prodi Ilmu Sejarah Universitas Jambi, perpustakaan Universitas Jambi, Perpustakaan Wilayah Jambi, maupun Perpustakaan Umum Kota Jambi, serta Kantor Kearsipan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Ketiga, penulis melakukan wawancara terhadap subjek yang akan diteliti yang berkaitan dengan penelitian seperti melakukan wawancara terhadap tokoh saksi sejarah pada masa Kewedanaan, tokoh masyarakat, tokoh lembaga adat, dan tokoh pemerintahan Kabupaten Muara Jambi. Beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer diantaranya adalah Arsip Jambi Luar Kota masa kolonial yang tersimpang di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, laporan pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dan tulisan yang se Zaman yang di dapatkan di Arsip Kabupaten Muaro Jambi. Adapun sumber sekunder yakni hasil wawancara bersama tokoh setempat, buku, karya ilmiah terkait yang di dapatkan pada Perpustakaan Umum Universitas Jambi, Perpustakaan Ilmu Sejarah UNJA dan Perpustakaan Fakultas Ada dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Taha.

---

<sup>16</sup> Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016). Hlm. 35.

## 2. Kritik Sumber

Setelah mendapatkan sumber yang cukup, selanjutnya penulis mengawalinya dengan membaca secara cermat sumber sejarah berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian dilakukan untuk proses pengujian kebenaran data dalam berbagai kategori yang telah terkumpul untuk memperoleh keabsahan sumber. Keabsahan sumber penulis yang dimaksud adalah sudah teruji keasliannya (otentitas) dilakukan melalui kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan penyelidikan fakta-fakta dengan melakukan pengujian terhadap dokumen. Kritik intern bertujuan untuk mengungkapkan apakah isi sumber yang dipergunakan dapat dipercaya atau tidak, dengan cara membandingkannya dengan sumber yang lain, kemudian dengan cara menganalisa kebenaran terhadap informasi atau sumber agar mendapat jawaban apakah sumber informasi ini relevan dengan penelitian atau tidak. Sedangkan kritik ekstern dilakukan dengan cara memperhatikan aspek fisik dan menganalisis kebenaran, seperti apakah sumber itu asli atau palsu masih lengkap atau tidak yang ejaannya, bagaimana gaya tulisannya, kertasnya, tintanya dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui autensitasnya.

Kritik sumber sangat diperlukan dalam penulisan sejarah karena semakin kritis dalam menilai suatu sumber sejarah, maka semakin otentik penelitian sejarah tersebut.

## 3. Interpretasi

Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau pemberian kesan, pendapat serta pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Interpretasi terdiri atas analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, dalam suatu sumber sejarah terkandung

beberapa kemungkinan. Analisis dilakukan untuk menentukan fakta dari data yang diperoleh. Sedangkan sintesis berarti menyatukan, dari data-data yang terkumpul diambil suatu kesatuan untuk memperjelas maksud atau isi dari tulisan tersebut yang telah disaring dalam tahapan verifikasi, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Proses penyusunan, merangkai antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah yang lain sehingga dapat menjadi satu-kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Tujuannya agar data yang ada dapat mengungkapkan permasalahan yang ada, sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam proses interpretasi tidak semua fakta dapat dimasukkan, tetapi harus dipilih mana yang lebih relevan dengan gambaran penelitian yang diambil sehingga lebih jelas untuk mendiskripsikan topik yang dibahas.<sup>17</sup>

Apabila penulis tidak mendapat data yang lebih valid, maka sumber yang telah diuji kebenaran dan keotentikannya itu, penulis jadikan kesimpulan akhir, hasil dari kesimpulan tersebut yang telah dianalisa sesuai dengan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian ini. Masuk dalam tahap berikutnya yaitu tahapan penulisan skripsi.

#### 4. Historiografi

Historiografi dapat diartikan sebagai penghasil karya atau suatu proses penulisan sejarah. Karya tersebut dapat berupa buku sejarah, artikel, skripsi, tesis maupun karya-karya tulisan sejarah lainnya yang hasil akhirnya dapat dipertanggung jawab secara kejadiannya, sehingga suatu karya sejarah akan bersifat obyektif.

Historiografi telah melewati beberapa proses penyaringan hingga menjadi kesimpulan akhir yang relevan, kemudian fakta tersebut ditulis dan disajikan secara kronologis dan sistematis dalam bentuk penulisan. Penulisan ini terdiri dari tiga

---

<sup>17</sup> Kuntowijoyo, “*Pengantar Ilmu Sejarah*”, (Yogyakarta:Betung Budaya, 1995). Hlm. 101.

pembahasan pokok yaitu: pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang dibagi dalam bab-bab sesuai dengan sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini menguraikan 1.1 Latar Belakang Masalah, 1.2 Rumusan Masalah, 1.3 Ruang Lingkup, 1.4 Manfaat dan Tujuan, 1.5 Tinjauan Pustaka, 1.6 Kerangka Konseptual, 1.7 Metode Penelitian

## **BAB II PERKEMBANGAN KEWEDANAAN JAMBI LUAR KOTA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Gambaran Kewedanaan Jambi Luar Kota seperti 2.1 Geografis, 2.3 Demografis, 2.4 Keadaan Sosial Budaya dan 2.5 Perekonomian Jambi Luar Kota

## **BAB III AKHIR PEMERINTAHAN KEWEDANAAN JAMBI LUAR KOTA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai 3.1 Pembentukan Kewedanaan di Jambi Luar Kota, 3.2 Sistem Pemerintahan di Kewedanaan Jambi Luar Kota dan 3.3 Peranan Pemerintahan Kewedanaan Jambi Luar Kota Masa Agresi

## **BAB IV PENGHAPUSAN KEWEDANAAN JAMBI LUAR KOTA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai 4.1 Jambi Luar Kota dalam Keresidenan Jambi, 4.2 Jambi Luar Kota Masa Pemerintahan Sumatera Tengah dan 4.3 Penghapusan Kewedanaan Jambi Luar Kota.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab penutup berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta kritik dan saran berdasarkan hasil penelitian.